

BKD



LAPORAN ***MONITORING*** ***DAN EVALUASI*** ***RENCANA*** ***AKSI***

2023



bkd.provinsibanten

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I-IV Tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten sebagai salah satu Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai media informasi, pertanggungjawaban kinerja serta sebagai alat pengendali menuju terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan program pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran pencapaian kinerja kegiatan atas dokumen rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun. Dalam laporan kinerja ini dijabarkan mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

Akhir kata, semoga penyajian laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten dapat menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada akhir tahun 2023.

Serang, Desember 2023

KEPALA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BANTEN**



Dr. NANA SUPIANA

NIP. 19711213 20012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
1.1. Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023	iii
1.2. Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I-IV	8
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten	8
II. Program Kepegawaian.....	9
III. Realisasi Kinerja BKD Provinsi Banten.....	15
IV. Realisasi Anggaran BKD Provinsi Banten	24
BAB III PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

1.1. Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023	6
1.2. Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023	7

BAB I

PENDAHULUAN

Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pengendalian merupakan upaya untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan. Data hasil pemantauan ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pengendalian dan bahan bagi pelaksanaan evaluasi, baik evaluasi tahap pelaksanaan (*ongoing*), evaluasi hasil, maupun evaluasi pra-rencana (*ex ante*).

Kebutuhan akan data secara sistematis sangat menentukan kualitas pengendalian dan hasil evaluasi. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati.

Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program), selain itu kegiatan monitoring juga dapat memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan untuk melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan target. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Sedangkan Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya.

Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Besaran pagu anggaran yang dapat direalisasikan dapat mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan antara lain mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang semakin merata dan stabilitas perekonomian yang makin terjaga. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran.

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula.

Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sektor, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai ;
2. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai2 yang mendasari pemilihan tujuan dan target ;
3. Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif dan efisien;
4. Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
5. Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
6. Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek ;
7. Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
8. Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.

Pengendalian merupakan serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan Pimpinan organisasi melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan

evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan dilakukan untuk memenuhi/menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Pada Tahun 2023 kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten terdiri dari 2 (dua) program dengan 12 (dua belas) kegiatan.

Pengukuran pencapaian kinerja dihitung berdasarkan target dokumen Perjanjian kinerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran dibandingkan dengan realisasi capaian pada akhir periode anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuan dari penetapan kinerja :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerimaamanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Monitong dan Evaluasi Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja dan pengelolaan data Kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian berupa keberhasilan/kegagalan kinerja yang diperjanjikan dan telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Alur kerja yang dilakukan adalah Unit Kerja melakukan pengukuran kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Hasil pengukuran kinerja merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja.

Penetapan kinerja tahun 2023 merupakan tahun ke-1 Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tahun 2023-2026, dengan penetapan kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.1
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70-80
2	Meningkatnya Penerapanan Merit Sistem	Indeks Profesionalitas ASN (Kualifikasi, Kinerja dan Kedisiplinan)	Nilai	24,48
		Indeks Merit Sistem	Nilai	321,5

Tabel 1.2
Target Indikator Kinerja Program Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persen	100%
a	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%
b	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100%
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100%
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100%
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100%
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%
2	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	Persen	4,98
		Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	Persen	2,5
		Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	Persen	17
		Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Persen	38,5
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	Persen	38,5
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	Persen	21
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	Persen	32
		Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Persen	65
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	Persen	78
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Persen	34
		Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	Persen	14,5
a	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persen	100%
b	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persen	100%
c.	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100%
d.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Ketercapaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persen	100%

BAB II

HASIL MONITORING DAN EVALUASI TRIWULAN I-IV

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten

Realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp. 36.982.575.031, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi Rp. 22.091.466.951 (95,61%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. belanja pegawai disesuaikan dengan eksistensi jumlah P N S sebanyak 74 pegawai dan PPPK sebanyak 129 pegawai.
 - b. Efisiensi dari Belanja Tunjangan Kinerja 13 dan 14 yang dibayarkan hanya sebesar 50% dari nilai tarif, sedangkan untuk penganggarnya tetap menggunakan tarif 100% sehingga mengakibatkan adanya efisiensi anggaran pada rekening tersebut.
2. Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 1.331.393.699 (96,62%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Efisiensi dari Penganggaran Belanja Cetak dan Belanja Narasumber, dimana terdapat aturan bahwa Narasumber dari instansi penyelenggara hanya dibayarkan sebesar 50% dari nilai tarif SHS.
3. Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah telah terlaksana sebesar Rp. 488.539.462 (92,63%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Efisiensi Kontrak.
4. Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah telah terlaksana Rp. 3.083.589.175 (99,15%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Perjalanan Dinas (Dalam dan Luar) sesuai kebutuhan.
5. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat belanja penyediaan rutin kantor telah terlaksana sebesar Rp. 1.321.033.648 (97,21%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Belanja listrik dan tagihan telpon direalisasikan sesuai tagihan PLN dan Telkom;
 - b. Penyediaan jasa pelayanan kantor direalisasikan sesuai dengan Pengajuan Nota Dinas dan Kebutuhan.
- 6. Pada kegiatan Pengadaan Barang Daerah Milik Daerah telah terlaksana sebesar Rp. 6.536.164.558 (98,68%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Efisiensi Kontrak.
- 7. Pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah terlaksana sebesar 1.961.416.727 (98,43%), adapun penjelasan dari sisa anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan serta Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasikan sesuai dengan nota dinas pengajuan service dari pemegang BMD.

II. Program Kepegawaian

Realisasi kegiatan **Program Kepegawaian** sebesar Rp. 7.538.969.143 (92,17%).

Dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Pada Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan telah terlaksana dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 4,98 dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar 5,00 sehingga Nilai Capaian Indikator Kinerja Program adalah 100,40% dalam kata lain Melebihi Target.
 - a. Pada Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ditetapkan target sebesar 2,5 dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar 25 sehingga Nilai Capaian

Indikator Kinerja Program adalah 1000,00% dalam kata lain Melebihi Target.

- b. Pada Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 17 dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar 16,25 sehingga Nilai Capaian Indikator Kinerja Program adalah 95,59% dalam kata lain Tidak Mencapai Target.
- c. Pada Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 38,5 dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar 40,00 sehingga Nilai Capaian Indikator Kinerja Program adalah 103,90% dalam kata lain Melebihi Target.
- d. Pada Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 38,5 dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar 40,00 sehingga Nilai Capaian Indikator Kinerja Program adalah 103,90% dalam kata lain Melebihi Target.
- e. Pada Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 21,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar 22,00 sehingga Nilai Capaian Indikator Kinerja Program adalah 104,76% dalam kata lain Melebihi Target.
- f. Pada Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 21,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar 22,00 sehingga Nilai Capaian Indikator Kinerja Program adalah 117,19% dalam kata lain Melebihi Target.
- g. Pada Nilai Kriteria Pengembangan Karier, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 65,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar 65,00 sehingga Nilai Capaian Indikator Kinerja Program adalah 100% dalam kata lain Sesuai Target.
- h. Pada Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja, dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 ditetapkan target sebesar 78,00 dan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 mencapai realisasi sebesar 72,50 sehingga Nilai

Capaian Indikator Kinerja Program adalah 92,95% dalam kata lain Belum Mencapai Target.

- i. Reviu atas Laporan Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran Gaji PPPK bulan Oktober dan susulan September 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP;
 - j. Reviu Dana Alokasi Umum atas Laporan Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran Gaji PPPK bulan November dan Desember 2023 pada Pemerintah Provinsi Banten, sebanyak 2 LHP.
2. Pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN telah terlaksana sebesar Rp. 819.741.180 (63,04%), adapun penjelasan output sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah.
 - b. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS adalah Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen Pelayanan Kepangkatan PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten). Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2023 pengurusan KGB dilakukan melalui aplikasi SIMASTEN.
 - c. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen Pengelolaan Promosi ASN).
3. Pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN telah terlaksana sebesar Rp. 1.730.723.472 (95,81%), adapun penjelasan output sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN adalah Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya.
 - b. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center adalah Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center.

- c. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN.
- d. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola.
- e. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat.
- f. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN adalah Jumlah Dokumen Hasil Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN.
- g. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN.
- h. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional.
- i. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional.
- j. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN adalah Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN.
- k. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional.
- l. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN.
- m. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN adalah Jumlah Fungsional ASN yang Dibina.

- n. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional.
 - o. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional.
4. Pada kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur telah terlaksana sebesar Rp. 938.349.726 (95,82%), adapun penjelasan output sub kegiatan adalah sebagai berikut :
- a. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
 - b. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
 - c. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
 - d. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai adalah Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan.
 - e. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai adalah Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa.
 - f. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur.
 - g. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN adalah Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan.
 - h. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN.

- i. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai adalah Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani.
- j. Output dari pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja :

1. Lemahnya/kekurangan pemahaman para stakeholder terhadap sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait;
3. Sistem tata kelola pemerintahan (SAKIP) masih banyak yang bersifat manual untuk pembuatan Berita Acara dan Lampiran;
4. Adanya perubahan dan atau tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat/provinsi.

Solusi Penghambat Capaian Kinerja :

1. Perlunya sosialisasi kepada para stakeholder terkait sistem perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penguatan koordinasi antar instansi terkait;
3. Penyempurnaan Aplikasi SAKIP untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pencapaian kinerja instansi;
4. Konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi yang tumpang tindih.

III. Realisasi Kinerja BKD Provinsi Banten

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Persentase Ketercapaian dari Seluruh Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100,00	100,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	100,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	100,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	203	100,00
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	100,00

		<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12	100,00
		<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>	12	100,00
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1	100,00
		<i>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1	100,00
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	18	100,00
		<i>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>	1	100,00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100,00	100,00
		<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	2	100,00
		<i>Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1	100,00
		<i>Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>	4	100,00
		<i>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	4	100,00
		<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1	100,00

		<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	1	100,00
		<i>Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</i>	4	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	100,00
		<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	4	100,00
		<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	2	100,00
		<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	1	100,00
		<i>Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	1	100,00
		<i>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	2	100,00
		<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	20	100,00
		<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	4	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100,00
		<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	10	100,00
		<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	10	100,00

		<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>
		<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>
		<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>
		<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>
		<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>
		<i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	100,00
		<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>5</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>5</i>	<i>100,00</i>
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00
		<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>12</i>	<i>100,00</i>
		<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>12</i>	<i>100,00</i>

		<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	12	100,00
		<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12	100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	2	100,00
		<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	30	100,00
		<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10	100,00
		<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1	100,00
Program Kepegawaian Daerah					
			Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kedisiplinan	5,00	100,40
			Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kinerja	25,15	1006,00
			Nilai Indeks Profesional ASN Dimensi Kualifikasi	21,90	128,82
			Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	40,00	103,90
			Nilai Kriteria Pelaksanaan Pengadaan Pegawai	40,00	103,90

			Nilai Kriteria Pelaksanaan Sistem Informasi	22,00	104,76
			Nilai Kriteria Pelaksanaan Mutasi dan Promosi	37,50	117,19
			Nilai Kriteria Pengembangan Karier	65,00	100,00
			Nilai Kriteria Pelaksanaan Manajemen Kinerja	72,50	92,95
			Nilai Kriteria Pelaksanaan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	37,50	110,29
			Nilai Kriteria Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan	16,00	110,34
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100,00	100,00
		<i>Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
		<i>Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
		<i>Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>	<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
		<i>Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
		<i>Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
		<i>Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
		<i>Evaluasi Pemberhentian ASN</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
		<i>Fasilitasi Lembaga Profesi ASN</i>	<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>

		<i>Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN</i>	1	100,00
		<i>Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	12	100,00
		<i>Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>	1	100,00
		<i>Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	1	100,00
	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Ketercapaian Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	100,00	100,00
		<i>Pengelolaan Mutasi ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah</i>	1	100,00
		<i>Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>	1	100,00
		<i>Pengelolaan Promosi ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>	1	100,00
	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase Ketercapaian Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	100,00	100,00
		<i>Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	19	100,00
		<i>Pengelolaan Assessment Center</i>	<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center</i>	1	100,00
		<i>Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN</i>	1	100,00
		<i>Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola</i>	1	100,00
		<i>Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat</i>	1	100,00
		<i>Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN</i>	18	100,00

		<i>Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN</i>	1	100,00
		<i>Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional</i>	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional</i>	63	100,00
		<i>Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional</i>	1	100,00
		<i>Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN</i>	63	100,00
		<i>Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional</i>	2	100,00
		<i>Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN</i>	4	100,00
		<i>Pembinaan Jabatan Fungsional ASN</i>	<i>Jumlah Fungsional ASN yang Dibina</i>	750	100,00
		<i>Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional</i>	2	100,00
		<i>Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional</i>	1	100,00
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Ketercapaian Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00	100,00
		<i>Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	1	100,00
		<i>Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	1	100,00
		<i>Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>	1	100,00
		<i>Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai</i>	<i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>	2	100,00
		<i>Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai</i>	<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>	450	100,00

		<i>Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pembinaan Disiplin ASN</i>	<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>	<i>1800</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
		<i>Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai</i>	<i>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>
		<i>Evaluasi Disiplin ASN</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN</i>	<i>1</i>	<i>100,00</i>

IV. Realisasi Anggaran BKD Provinsi Banten

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi		31.850.235.670	30.658.228.873	96,26	1.192.006.797
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.377.951.650,00	1.331.393.699	96,62	46.557.951,00
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.103.326.650,00	1.065.386.043	96,56	37.940.607,00
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000,00	20.000.000	100,00	0,00
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000,00	20.000.000	100,00	0,00
04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20.000.000,00	20.000.000	100,00	0,00
05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	20.000.000,00	20.000.000	100,00	0,00
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	24.529.731	98,12	470.269,00
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.625.000,00	161.477.925	95,20	8.147.075,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.105.660.316,00	22.091.466.951	95,61	1.014.193.365,00
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.425.660.316,00	21.424.857.286	95,54	1.000.803.030,00
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.000.000,00	495.873.434	99,17	4.126.566,00
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	57.322.000,00	52.195.339	91,06	5.126.661,00
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.000.000,00	19.690.404	98,45	309.596,00

05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	18.933.150	94,67	1.066.850,00
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	12.678.000,00	12.384.000	97,68	294.000,00
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	50.000.000,00	48.461.994	96,92	1.538.006,00
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20.000.000,00	19.071.344	95,36	928.656,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		170.000.000,00	168.970.811	99,39	1.029.189,00
01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	19.903.117	99,52	96.883,00
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	49.736.296	99,47	263.704,00
03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	19.852.051	99,26	147.949,00
04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	19.878.675	99,39	121.325,00
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	19.833.331	99,17	166.669,00
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000	19.881.975	99,41	118.025,00
07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000	19.885.366	99,43	114.634,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		527.396.000,00	488.539.462	92,63	38.856.538,00
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	50.000.000	48.649.879	97,30	1.350.121,00
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	268.480.000	245.618.400	91,48	22.861.600,00
03	Pendataan dan Pengolahan	25.000.000	24.843.827	99,38	156.173,00

	Administrasi Kepegawaian				
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.000.000	24.568.201	98,27	431.799,00
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.000.000	23.689.096	94,76	1.310.904,00
06	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.500.000	77.500.000	100,00	0,00
07	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	56.416.000	43.670.059	77,41	12.745.941,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.109.936.100,00	3.083.589.175	99,15	26.346.925,00
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000	99.928.130	99,93	71.870,00
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	510.579.000	506.070.497	99,12	4.508.503,00
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000	199.540.694	99,77	459.306,00
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	438.240.000	438.063.600	99,96	176.400,00
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.037.981.600	1.036.643.067	99,87	1.338.533,00
06	Penyediaan Bahan/Material	122.110.000	115.361.801	94,47	6.748.199,00
07	Fasilitasi Kunjungan Tamu	212.618.000	212.618.000	100,00	0,00
08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.107.500	413.774.430	99,92	333.070,00
09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50.000.000	37.305.000	74,61	12.695.000,00
10	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	24.300.000	24.283.956	99,93	16.044,00

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		214.693.400,00	211.818.400	98,66	2.875.000
01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.864.400,00	2.864.400	100,00	0,00
02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	211.829.000,00	208.954.000	98,64	2.875.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.359.003.560,00	1.321.033.648	97,21	37.969.912,00
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000	24.995.000	99,98	5.000,00
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	580.394.000	544.085.234	93,74	36.308.766,00
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.775.000	13.740.500	99,75	34.500,00
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	739.834.560	738.212.914	99,78	1.621.646,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.985.594.644,00	1.961.416.727	98,43	24.177.917,00
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.058.704	253.303.625	97,78	5.755.079,00
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	364.837.540	353.805.982	96,98	11.031.558,00
03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	748.320.000	742.459.720	99,22	5.860.280,00
04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	613.378.400	611.847.400	99,75	1.531.000,00
Program Kepegawaian Daerah		8.179.366.800	7.538.969.143	92,17	640.397.657

Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		4.097.425.000,00	4.050.154.765	98,08	47.270.235,00
01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	14.000.000,00	13.807.000	98,62	193.000,00
02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	32.000.000,00	31.585.300	98,70	414.700,00
03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1.080.000.000,00	1.049.012.944	97,13	30.987.056,00
04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	30.000.000,00	29.737.226	99,12	262.774,00
05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	20.000.000,00	18.465.475	92,33	1.534.525,00
06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	340.000.000,00	338.361.444	99,52	1.638.556,00
07	Evaluasi Pemberhentian ASN	30.000.000,00	28.889.864	96,30	1.110.136,00
08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1.450.000.000,00	1.443.722.254	99,57	6.277.746,00
09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	79.000.000,00	76.156.260	96,40	2.843.740,00
10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	721.425.000,00	721.424.313	100,00	687,00
11	Pengelolaan Data Kepegawaian	271.000.000,00	268.997.164	99,26	2.002.836,00
12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	30.000.000,00	29.995.521	99,99	4.479,00
Mutasi dan Promosi ASN		1.300.330.000,00	819.741.180	63,04	480.588.820,00
01	Pengelolaan Mutasi ASN	107.030.000,00	100.815.700	94,19	6.214.300,00
02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	400.000.000,00	399.360.120	99,84	639.880,00
03	Pengelolaan Promosi ASN	793.300.000,00	319.565.360	40,28	473.734.640,00

Pengembangan Kompetensi ASN		1.802.368.000,00	1.730.723.472	95,81	71.644.528,00
01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	332.558.000,00	331.491.042	99,68	1.066.958,00
02	Pengelolaan Assessment Center	244.650.000,00	238.528.200	97,50	6.121.800,00
03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	100.000.000,00	99.541.800	99,54	458.200,00
04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	114.910.000,00	96.135.252	83,66	18.774.748,00
05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	40.000.000,00	39.914.913	99,79	85.087,00
06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	162.000.000,00	161.920.731	99,95	79.269,00
07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	19.300.000,00	19.223.466	99,60	76.534,00
08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	24.000.000,00	23.753.698	98,97	246.302,00
09	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	30.000.000,00	29.627.263	98,76	372.737,00
10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	52.000.000,00	43.110.760	82,91	8.889.240,00
11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	10.800.000,00	10.653.391	98,64	146.609,00
12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	59.500.000,00	51.702.000	86,89	7.798.000,00
13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	394.650.000,00	372.118.695	94,29	22.531.305,00
14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	188.000.000,00	183.130.700	97,41	4.869.300,00
15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	30.000.000,00	29.871.561	99,57	128.439,00
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		979.243.800,00	938.349.726	95,82	40.894.074,00
01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12.850.000,00	12.846.409	99,97	3.591,00

02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	198.158.000,00	189.863.217	95,81	8.294.783,00
03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30.640.000,00	29.693.150	96,91	946.850,00
04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	40.903.400,00	38.209.431	93,41	2.693.969,00
05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	81.560.400,00	80.157.613	98,28	1.402.787,00
06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	15.732.000,00	15.727.716	99,97	4.284,00
07	Pembinaan Disiplin ASN	493.944.700,00	469.545.683	95,06	24.399.017,00
08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	79.807.400,00	77.351.500	96,92	2.455.900,00
09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	14.207.700,00	13.570.545	95,52	637.155,00
10	Evaluasi Disiplin ASN	11.440.200,00	11.384.462	99,51	55.738,00
BELANJA MODAL		6.407.070.050,00	6.324.346.158	98,71	82.723.892,25
Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Provinsi		6.407.070.050,00	6.324.346.158	98,71	82.723.892,25
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		6.407.070.050	6.324.346.158	98,71	82.723.892
02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.514.273.900,00	2.444.780.462	97,24	69.493.438,00
06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.892.796.150,00	3.879.565.696	99,66	13.230.454,25

BAB III

PENUTUP

Laporan monitoring dan evaluasi ini memberikan informasi tentang kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten pada Triwulan I-IV tahun 2023, baik capaian kinerjanya maupun tingkat penyerapan anggarannya.

Dengan adanya laporan monitoring dan evaluasi ini dapat dijadikan bahan evaluasi atas rencana aksi yang telah disusun ditahun ini dan sebagai bahan untuk pembuatan rencana aksi ditahun berikutnya agar capaian kinerja serta tingkat penyerapan anggaran dapat optimal sesuai dengan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta tepat sasaran dan berdaya guna.

Serang, Desember 2023

KEPALA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BANTEN**



Dr. NANA SUPIANA
NIP. 19711213 20012 1 002